



Sleman Hanya Mampu Tangani 22 Persen Sampah

SLEMAN, TRIBUN - Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman masih menjadi tantangan. Meski telah mengoperasikan dua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman baru mampu menangani 22 persen dari 602 ton sampah harian. Alhasil, TPA Piyungan masih menjadi andalan untuk membuang sisa sampah yang tidak bisa diolah di tingkat lokal.

"Kami harus mengakui masih membutuhkan TPA (Piyungan), tetapi untuk sampah residu. Karena, ada (sampah) yang bisa kami olah dan ada yang belum bisa kami olah. Tapi, kita tidak berhenti begitu saja, kami akan mengupayakan agar ke depan bisa mengolahnya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman, Epiphana Kristiyani, Kamis (3/7).

Ia tidak menampik sudah mengajukan permohonan agar diperbolehkan membuang sampah di TPA Piyungan,

terutama residu yang tidak bisa diolah di TPST Tamanmartani maupun TPST Sendangsari. Sampah residu misalnya seperti sisa popok ataupun kasur, yang memang sulit diolah.

"Bukan berarti kami lepas kemudian membuang semua sampah ke sana. Hanya residu yang belum bisa diolah. Karena, kami belum punya (alatnya), kami sedang berupaya," imbuh dia.

Terkait sampah kasur, menurut Epi, ada warga yang membuang. Jika sampah tersebut diolah di TPST maka berpotensi melilit dan merusak mata pisau pencacah. Jika itu terjadi, butuh waktu tiga hari untuk memperbaikinya, sehingga TPST terpaksa berhenti beroperasi.

"Jika selama tiga hari berhenti mengolah sampah, kami bisa diprotes masyarakat," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo mengatakan berdasarkan kebijak-

an Gubernur DIY secara reguler TPA Piyungan sudah ditutup sejak 2024. Namun, pihaknya tidak lantas langsung menutup semua pembuangan sampah ke sana, melainkan masih dibuka ruang untuk kedaruratan.

"Nah kalau kedaruratan kami ada space dan itu ada mekanismenya, ada SOP-nya. Kepala daerah harus bersurat ke kepada Gubernur atau Pak Sekda untuk bisa menggunakan TPA Piyungan. Kami masih ada space untuk kedaruratan sampai di akhir tahun 2025, hanya memang kapasitas sangat terbatas," katanya.

Sejauh ini ada tiga kabupaten/kota yang sudah mengajukan permohonan, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Kuota kedaruratan yang diberikan totalnya 1.000 ton per bulan, untuk tiga kabupaten. "Pembagiannya tidak sama, disesuaikan dengan porsinya masing-masing," ujar dia. (rif)